

II. TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teoritis

1.1.1 Problematika Implementasi Kebijakan

A. Pengertian Problematika Implementasi Kebijakan

Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "*problematic*" yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia (KBBI) problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan dan menimbulkan permasalahan. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal (Hikmah, 2020). Selanjutnya menurut Vutra (2019) problem adalah "masalah atau persoalan" jadi yang dimaksud problematika adalah masih menimbulkan perdebatan, masih menimbulkan suatu masalah yang harus dipecahkan. Problematika adalah suatu kesenjangan yang mana antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan.

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintahan, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan (Sopianto, 2019). Selanjutnya menurut Hanifah (2022) implementasi adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (1978) dalam Kasmad (2018) menyatakan bahwa "Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan".

Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, sedangkan implementasi adalah

tindakan intervensi itu sendiri. Dalam proses implementasi sebuah kebijakan akan melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi *street level bureaucracy* untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku target group. Implementasi adalah suatu tindakan yang berkenaan dengan pemerintahan atau swasta baik secara perorangan ataupun kelompok yang diarahkan para realisasi suatu program. Implementasi menyangkut 3 (tiga) hal yaitu adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan dalam pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian tujuan hasil akhir (*output*) yaitu tercapainya tujuan yang ingin diraih, perlu dicatat bahwa implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur suatu kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tindakan pencapaian tujuan (Aji, 2021).

B. Model Implementasi Kebijakan

Menurut Kasmad (2018) pada model implementasi kebijakan, rencana bernilai 20%, keberhasilan implementasi 60%, sisanya 20% adalah bagaimana mengendalikan implementasi. Semua model kebijakan implementasi berusaha menjelaskan keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli yaitu :

1. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) dalam Kasmad (2018)

Model pertama dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) adalah model yang paling klasik. Model ini mengendalikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Model kebijakan adalah yang memperlihatkan 6 (enam) variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan kinerja, yaitu *policy standard and objectives, policy resources*, kemudian ditambah lagi dengan 4 (empat) faktor yang berhubungan dengan kinerja kebijakan yaitu, *interorganizational communication and enforcement activities; characteristics of the implementation agencies; economic, social, and political condition; and disposition of implementors*.

1) Standar dan Tujuan Kebijakan (*Policy Standard and Objectives*)

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja kebijakan adalah standar dan tujuan-tujuan kebijakan. Oleh karena itu, indikator-indikator keberhasilan dan tujuan-tujuan kebijakan perlu jelas sehingga pihak pelaksana kebijakan tidak menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Terjadinya berbagai interpretasi dari tujuan kebijakan tersebut akan dapat menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

2) Sumber Daya Kebijakan (*Policy Resources*)

Selain indikator-indikator kinerja kebijakan dan tujuan-tujuan kebijakan harus jelas, juga sumber-sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan tidak bisa disepelekan. Sumber-sumber daya yang dimaksud di sini adalah dana, materi, manusia, dan berbagai insentif yang dapat melancarkan pelaksanaan suatu kebijakan. Insentif dapat berupa pemberian hadiah bagi mereka yang berhasil dalam pelaksanaan pekerjaan, dan pemberian “hukuman” bagi mereka yang gagal dalam melaksanakan tugasnya.

3) Kegiatan Komunikasi dan Penegakan Interorganisasional (*Interorganizational Communication and Enforcement Activities*)

Dalam model ini, standar kinerja dan tujuan-tujuan kebijakan serta sumber-sumber daya merupakan faktor-faktor utama yang menentukan kinerja kebijakan. Selain faktor-faktor utama tersebut, ada faktor pendukung lain yang perlu diperhatikan dalam memperlancar pelaksanaan kebijakan, diantaranya adalah komunikasi antar organisasi dan aktivitas-aktivitas penguatan. Komunikasi antar organisasi perlu untuk memperlancar proses berjalannya informasi dari sumber-sumber informasi dalam rangka memperjelas standar-standar atau indikator-indikator kinerja kebijakan. Baik atau tidaknya saluran komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan adanya pendorong atau penguatan terhadap pihak pelaksana. Aktivitas penguatan yang dimaksud adalah *technical advice and assistance* dan ganjaran baik positif maupun negatif, bagi pihak pelaksana kebijakan.

4) Karakteristik Badan Pelaksana (*The Characteristic of The Implementing Agencies*)

Faktor pendukung kedua dalam model ini, yang ikut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, adalah karakteristik badan yang melaksanakan kebijakan. Menurut Ripley (dikutip oleh Meter dan Horn, 1971), ada 6 (enam) karakteristik yang perlu dimiliki oleh badan pelaksana kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf lembaga:
 2. Tingkat kendali hierarki atas keputusan dan proses sub-unit di dalam badan pelaksana:
 3. Sumber daya politik lembaga (misalnya, dukungan di antara legislator dan eksekutif:
 4. Vitalitas organisasi
 5. Tingkat komunikasi “terbuka” (yaitu, jaringan komunikasi dengan komunikasi horizontal dan vertikal yang bebas, dan tingkat kebebasan yang relatif tinggi dalam komunikasi dengan orang-orang di luar organisasi) di dalam suatu organisasi; dan
 6. Hubungan formal dan informal lembaga dengan badan “pembuat kebijakan” atau “penegakan kebijakan”.
- 5) Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik (*Economic, Social, and Political Conditions*)

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan salah satu faktor pendukung yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini, ketersediaan sumber-sumber daya ekonomi sangat dibutuhkan dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Kondisi sosial juga perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan, karena hal merupakan kelompok sasaran dari suatu kebijakan publik. Demikian juga, pentingnya kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat diperhatikan, baik dalam formulasi kebijakan maupun dalam implementasinya.

6) Disposisi Pelaksana (*The Disposition of Implementors*)

Faktor pendukung ke empat yang perlu mendapat perhatian dalam implementasi kebijakan adalah disposisi para pelaksana kebijakan. Setiap komponen dalam model di atas akan disaring melalui persepsi dari para

implementor. Terdapat tiga elemen yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu *their cognition (comprehension, understanding) of the policy, the direction of their response toward it (acceptance, neutrality, rejection), and the intensity of that response.*

Berdasarkan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh van Meter dan van Horn di atas, terlihat bahwa mereka berusaha memperbaiki atau melengkapi kelemahan yang dimiliki oleh pendekatan implementasi kebijakan dari atas ke bawah (*Top-Down Approach*), dan sekaligus merupakan kelebihan yang dimiliki oleh model implementasi ini, yaitu 1) kejelasan variabel-variabel implementasi kebijakan; dan 2) kejelasan hubungan saling mempengaruhi antara variabel-variabel tersebut. Kelemahan yang dimiliki oleh model implementasi ini adalah adanya tumpang tindih antara indikator dan dimensi dari variabel *performance* (kinerja kebijakan).

2. Teori Model Implementasi George C. Edwards III (1980) dalam Kadji (2016)

Edwards III (1980) mengemukakan: “*In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the preconditions for successful policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation?*” Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edwards III (1980) menawarkan dan mempertimbangkan 4 (empat) faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu “komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), sikap pelaksana (*dispositions or attitudes*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)”.

1) Komunikasi (*Communication*)

Edwards III (1980:10) menegaskan implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, jika yang bertanggung jawab dalam proses implementasi kebijakan tersebut mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang benar-benar mampu melaksanakannya. Jika pesan dan perintah kebijakan yang diberikan oleh pembuat kebijakan tidak jelas dan tidak terspesifikasikan, maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman di tingkat implementor kebijakan yang ditunjuk. Jelas sekali akan terjadi

kebingungan di tingkat implementor, khususnya dalam memahami deskripsi tugas yang harus dilakukannya. Kondisi ini akan memberi peluang kepada mereka untuk tidak mengimplementasikan kebijakan tersebut sebagaimana dikehendaki oleh para pemberi mandat atau pembuat kebijakan.

Faktor komunikasi (dalam bentuk vertikal) memegang peran penting agar implementor kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Hal ini menjadi prasyarat agar pesan dan perintah kebijakan harus dikomunikasikan dengan perintah yang jelas dari atasan kepada implementor kebijakan, sehingga implementasi kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Sebab, tidak sempurnanya aspek komunikasi juga dapat mengakibatkan para implementor menafsirkan kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk menyempitkan kebijakan umum menjadi tindakan-tindakan spesifik. Inkonsistensi pesan dan isi komunikasi dapat mengakibatkan hambatan yang serius dalam implementasi kebijakan.

Aktivitas komunikasi dalam rangka penyampaian pesan informasi kebijakan tersebut, harus pula memperhatikan bentuk komunikasi organisasi secara umum, yaitu 1) Komunikasi formal adalah bentuk komunikasi yang diciptakan dan terbentuk secara terencana, melalui jalur-jalur formal dalam organisasi publik yang melekat pada saluran-saluran yang ditetapkan sebagaimana ditunjukkan melalui struktur organisasi, 2) Komunikasi *non* formal, adalah komunikasi yang ada di luar struktur organisasi publik, biasanya melalui saluran-saluran *non*-formal yang munculnya bersifat *insidental*, menurut kebutuhan atau hubungan *interpersonal* yang baik, atau atas dasar kesamaan kepentingan. Inti dari kedua bentuk komunikasi tersebut bermuara pada penciptaan produktivitas kerja dan kinerja komunikasi, baik secara individual maupun kolektivitas dalam sebuah organisasi.

2) Sumber Daya (*Resourches*)

Sehubungan dengan faktor *resourches* (sumber daya), Edwards III (1980:10) menjelaskan: *Important resourches include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation; the authority to ensure tha policies are carried out as they are intended; and facilities (including buildings, equipment, land, and supplies) in which or with which to provide*

services. Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided, and reasonable regulations will not be developed.

Sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan terjadi penyesuaian terhadap siapa saja yang terlibat di dalam implementasi kebijakan, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya untuk kepentingan pelayanan publik. Faktor sumber daya tidak hanya mencakup jumlah sumber daya manusia atau aparat semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut (kapasitas dan motivasi). Hal ini dapat menjelaskan tes bahwa sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan kinerja dalam implementasi kebijakan yang tepat dan efektif.

Betapapun jelas, akurat dan konsistennya perintah implementasi kebijakan tersebut, namun apabila orang-orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut kekurangan sumber daya dalam pekerjaan mereka, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya yang penting antara lain:

1. Jumlah staf yang cukup dengan keahlian yang memadai.
 2. Informasi yang cukup dan relevan mengenai instruksi implementasi kebijakan.
 3. Otoritas yang menjamin bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi sasaran dan tujuan dari kebijakan, serta dukungan fasilitas, termasuk sarana/prasarana, dan aktivitas untuk memberikan pelayanan publik.
 4. Sumber daya yang tidak mencukupi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak akan dapat diimplementasikan, pelayanan prima tidak akan dilaksanakan, dan aturan-aturan yang masuk akalpun tidak akan disusun dengan sebaik-baiknya.
- 3) Sikap Pelaksana (*Dispositions or Attitudes*)

Edwards III (1980:11) menjelaskan : *The dispositions or attitudes of*

implementations is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. If implementation is proceed effectively, not only must implementers know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. Most implemntors can exercise considerable discretion in the implementation io policies. One of the reasons for this is their independence from their nominal superiors who formulate the policies. Another reason is the complecity of the policies themselves. The way in which implementers exercise their dicretion, however, depends in large part upon their dispositions toward the policies. Their attitudes, in turn, will be influenced by their views toward the policies per se and by how they see the policies effecting their organizational anf personal interests.

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para implementor menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap eksistensi dari pembuat kebijakan. Alasan yang lain adalah kompleksitas masalah dari kebijakan itu sendiri. Meskipun cara lain para implementor menggunakan otoritasnya tergantung dari kecenderungan sikap mereka yang mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap merekalah yang akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka.

Terkadang para implementor tidak selalu melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Akibatnya pembuat kebijakan sering berhadapan dengan tugas-tugas untuk memanipulasi atau bekerja dalam lingkungan disposisi para pelaksananya atau bahkan membatasi otoritasnya. Jika para implementor memiliki kecenderungan sikap yang baik terhadap kebijakan tertentu, maka mereka cenderung melaksanakannya sesuai juga dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan sebelumnya. Tetapi ketika perilaku dan perspektif para

implementor berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses implementasi kebijakan akan semakin tidak terarah dan bahkan akan membingungkan.

4) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Edwards III (1980:11) menjelaskan: *Even If sufficient resources to implement a policy exist and implementers know what to do and want to do it, implementation may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure. Organizational fragmentation may hinder the coordination necessary to implement successfully a complex policy requiring the cooperation of many people, and it may also waste scarce resources, inhibit change, create confusion, lead to policies working at cross-purposes, and result in important functions being overlooked.*

Meskipun sumber daya dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia untuk melaksanakannya, tapi terkadang proses implementasi kebijakan masih terhambat oleh *in-efisiensi* struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan proses implementasi sebuah kebijakan. Disisi lain bahwa dalam implementasi kebijakan membutuhkan kerjasama yang melibatkan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan.

Para implementor kebijakan akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai keinginan dan sumber daya untuk melakukan kebijakan, tetapi mereka akan tetap dihambat dalam proses implementasinya oleh struktur organisasi yang mereka layani. Asal usul karakteristik organisasi, fragmentasi birokrasi yang berbeda akan tetap menghambat implementasi kebijakan. Mereka selalu menghambat implementasi kebijakan, pemborosan sumber daya, melakukan tindakan yang tidak diharapkan, menghambat koordinasi, akibat proses implementasi kebijakan yang berbeda dan berlawanan arah, dan inilah sebab musabab terjadinya kegagalan implementasi dari sebuah kebijakan publik.

C. Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan

Dalam implementasi program sendiri memiliki suatu hambatan diantaranya menurut (Erwan dan Dyah 2015) dalam Aji (2021) mengidentifikasi 4 (empat) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi yaitu:

1. Kondisi Lingkungan (*Environmental Conditions*)

Kondisi lingkungan sangat menentukan pelaksanaan kebijakan. Agar pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik, maka harus dilihat kondisi lingkungan setiap wilayahnya dengan kondisi geografis, sosial, ekonomi, politik, karena kebijakan yang baik dan berkualitas tidak akan berhasil diimplementasikan jika kondisi lingkungan kurang kondusif.

2. Hubungan Antar Organisasi (*Inter-Organizational Relationship*)

Menjalin sebuah kerja sama dengan pihak lain demi tercapainya pelaksanaan kebijakan dengan baik. Menciptakan sebuah koordinasi yang baik antar pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran atau dengan pihak yang bekerja sama, seperti persamaan persepsi tentang tujuan kebijakan atau program, miliki sarana komunikasi yang baik dan memadai serta persamaan kepentingan.

3. Sumber Daya (*Resources*)

Prasyarat bagi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu adanya dukungan dari sumber daya yang dibutuhkan, dan sumber daya tersebut memadai untuk melaksanakan kebijakan atau program yang akan diimplementasikan, diantaranya Sumber Daya Manusia (SDM) atau Sumber Daya Finansial (SDF), teknologi, politik, dan informasi yang berkualitas.

4. Karakteristik Institusi Implementor (*Characteristic Implementing Agencies*)

Didalam sebuah pelaksanaan kebijakan agar mencapai keberhasilan yang maksimal, harus mengidentifikasi dan mengetahui karakteristik instansi yang mencakup struktur birokrasi, dan norma-norma yang berada didalamnya. Semua akan mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan atau program, respon implementor terhadap kebijakan yang terkait, dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik dan pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan serta yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.

1.1.2 Konsep Tata Kelola Pemerintahan

A. Pengertian Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*)

Menurut Effendi (2009) dalam Kamaluddin (2019) tata kelola pemerintahan (*good governance*) pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. *Good governance* menyentuh 3 (tiga) pihak yaitu pihak pemerintah (penyelenggara negara), pihak korporat atau dunia usaha (penggerak ekonomi), dan masyarakat sipil (menemukan kesesuaiannya). Ketiga pihak tersebut saling berperan dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik.

B. Prinsip Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*)

Bedasarkan teori yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2012) dalam Kamaluddin (2019) bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* terdiri dari :

1. Akuntabilitas

Aparatur pemerintah harus mampu mempertanggung-jawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugas dan fungsinya. Aparatur pemerintah harus dapat mempertanggung-jawabkan kebijaksanaan, program dan kegiatannya yang dilaksanakan atau dikeluarkannya termasuk pula yang terkait erat dengan pendayagunaan ketiga komponen dalam birokrasi pemerintahan, yaitu kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusianya. Prinsip akuntabilitas mensyaratkan adanya perhitungan *cost and benefit analysis* tidak terbatas dari segi ekonomi, tetapi juga sosial, dan sebagainya tergantung bidang kebijaksanaan atau kegiatannya dalam berbagai kebijaksanaan dan tindakan aparatur pemerintah. Selain itu, akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijaksanaan atau program. Dengan demikian, tidak ada satu kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan yang dapat lepas dari prinsip ini.

2. Keterbukaan dan Transparan (*Openess and Transparency*)

Masyarakat dan sesama aparatur pemerintah dapat mengetahui dan memperoleh data dan informasi dengan mudah tentang kebijaksanaan, program, dan kegiatan aparatur pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, atau data dan informasi lainnya yang tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang disepakati bersama. Keterbukaan dan transparan juga dalam arti masyarakat atau sesama aparatur dapat mengetahui atau dilibatkan dalam perumusan atau perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan publik yang terkait dengan dirinya. Data dan informasi yang berkaitan dengan tugas/fungsi aparatur pemerintah (instansi) yang bersangkutan harus disediakan secara benar, misalnya data Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN), data guru oleh Departemen Pendidikan Nasional, data realisasi panen padi oleh Departemen Pertanian, dan sebagainya. Perlunya dihindari adanya data dan informasi yang bersifat “menyenangkan” tetapi menutupi yang sebenarnya. Sebab keputusan atau kebijakan publik (*public policy*) yang diambil pimpinan yang tidak didasarkan pada data dan informasi yang sebenarnya, maka keputusan atau kebijaksanaan tersebut akan menimbulkan masalah baru seperti masalah lingkungan, anggaran (pemborosan), dan penderitaan transmigran yang ditempatkan di sana.

3. Ketaatan pada Aturan Hukum

Aparatur pemerintah menjunjung tinggi dan mendasarkan setiap tindakannya pada aturan hukum, baik yang berkaitan dengan lingkungan eksternal (masyarakat luas) maupun yang berlaku terbatas di lingkungan internalnya, misalnya: aturan kepegawaian dan aturan pengawasan fungsional. Prinsip ini juga mensyaratkan terbukanya kesempatan kepada masyarakat luas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam perumusan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masyarakat. Prinsip komitmen yang kuat untuk bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara, dan bukan pada kelompok, pribadi atau partai yang menjadi idolanya. Prinsip ini merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh aparatur pemerintahan. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah, sebagai pembina, pengarah, dan penyelenggara pemerintahan umum dan pembangunan (dalam batas-batas tertentu).

Prinsip komitmen untuk mengikutsertakan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Prinsip ini menegaskan bahwa tanpa komitmen ini, maka yang timbul bukan partisipasi masyarakat tetapi antipati dan ketidaksukaan dalam diri masyarakat terhadap perilaku dan kebijaksanaan aparatur pemerintah. Pada saat yang sama, dalam diri aparatur pemerintah akan tumbuh secara perlahan tetapi pasti sikap mendominasi, anggapan atau perasaan paling tahu, paling bisa dan paling berkuasa, dan cenderung tidak mau tahu kondisi dan pendapat orang lain, yang pada akhirnya menimbulkan arogansi birokrasi pemerintah.

C. Pilar Tata Kelola Pemerintahan

Menurut Mardiasmo (2021) dalam Arfin (2022) karakteristik pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) meliputi:

1. Partisipasi (*Participation*)

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta partisipasi secara konstruktif.

2. Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholders*.

5. Konsensus Kepentingan (*Consensus of Orientation*)

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6. Ekuitas (*Equity*)

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7. Efisiensi dan Efektifitas (*Efficiency and Effectiveness*)
Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. Akuntabel (*Accountability*)
Pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)
Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

1.1.3 Program

Program dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan. Program serangkaian tindakan atau kegiatan yang sistematis, yang sengaja dirancang atas dasar kebutuhan atau permasalahan tertentu, yang bertujuan untuk menghasilkan dampak atau hasil yang baik. Pelaksanaan dari program itu sendiri melibatkan banyak pihak yang harus mampu untuk berkoordinasi demi berjalannya program secara sistematis. Maka dapat disimpulkan bahwa program terdiri dari beberapa komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling menunjang dalam rangka mencapai suatu tujuan. Komponen program adalah bagian yang membangun sebuah program yang saling terkait dan merupakan faktor penentu keberhasilan program. Komponen-komponen dari tiap program tidak sama, komponen sangat dipengaruhi dari tingkat dari kompleksitas kegiatan program yang bersangkutan.

Penjabaran suatu program sedikitnya terlihat dari 5 (lima) hal yaitu:

1. Berbagai sasaran konkrit yang hendak dicapai;
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu;
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta identifikasi sumbernya;
4. Jenis-jenis kegiatan operasional yang akan dilaksanakan; dan
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan, baik ditinjau dari sudut kualifikasinya maupun ditinjau dari segi jumlahnya.

(Hanifah, 2022).

2.1.4 Kartu Tani

A. E-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)

Menurut Arfin (2022) permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi dapat diatasi aplikasi E- RDKK melalui kartu tani yang dibagikan kepada masing-masing petani digunakan sebagai alat penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi. Aplikasi E-RDKK diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih terjamin dan tepat sasaran bagi para petani penerima pupuk bersubsidi. E-RDKK adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi untuk petani. Aplikasi E-RDKK digunakan untuk melakukan input data dan menyimpan database petani yang berisi diantaranya data yang terdapat di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), identitas pribadi dan jumlah alokasi pupuk bersubsidi serta *monitoring* transaksi pembayaran pupuk bersubsidi untuk petani di pengecer yang telah ditentukan oleh pemerintah. Aplikasi E-RDKK membutuhkan data usulan RDKK masing-masing kelompok tani dan data alokasi pupuk bersubsidi, serta administrator *user* yang memiliki akses untuk mengelola (membuat/mengubah/menghapus) seluruh *user* yang ada dalam aplikasi E-RDKK. Kebijakan kartu tani adalah bantuan dari pemerintah untuk petani kurang mampu/miskin dengan harapan meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian.

B. Pengertian Kartu Tani

Kartu Tani adalah kartu debit bank *co- branding* yang digunakan secara khusus untuk membaca alokasi pupuk bersubsidi dan transaksi pembayaran pupuk bersubsidi di mesin *Electronic Data Capture* (EDC) milik bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Negara Indonesia (BNI) yang ditempatkan di pengecer/kios resmi untuk penebusan pupuk bersubsidi (Mufidah dan Indah, 2018). Kartu tani sebagai upaya menjamin *transparansi* dan *akuntabilitas* dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, dan menindaklanjuti rekomendasi Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka akan dilakukan implementasi penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani. Diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih terjamin dan tepat sasaran bagi petani yang berhak

menerima.

Program kartu tani ini melibatkan beberapa instansi terkait yaitu Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Gubernur dan Bupati/ Wali Kota (Kasiami, 2020). Menurut Gunawan dan Sahat (2020) kartu tani berfungsi sebagai kartu debit untuk penerimaan tabungan, pinjaman, subsidi maupun bantuan yang memuat identitas petani pemilik kartu. Kartu tani merupakan suatu basis data yang berisi data dan informasi terkait dengan identitas petani (nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan alamat), luas lahan, komoditas, alokasi pupuk bersubsidi, kebutuhan sarana produksi pertanian (saprotan), dan hasil panen.

C. Manfaat, Tujuan dan Sasaran Kartu Tani

Keberadaan kartu tani tidak hanya menguntungkan bagi para petani, di sisi lain kartu tani juga memberikan banyak manfaat dan keuntungan pada pemerintah sendiri. Dalam hal ini yang memegang peranan penting adalah Kementerian Pertanian (Arfin, 2022).

Adapun manfaat keberadaan kartu tani bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pertanian di antaranya yaitu:

1. Lebih Mudah Mendata Petani

Kartu tani ini nantinya menjadi *single entry* data bagi pemerintah dalam proses validasi secara berjenjang. Validasi tersebut juga semakin mudah karena data petani dalam kartu tani akan tersimpan secara *online* pada tingkat nasional.

2. Dana Subsidi

Manfaat berikutnya bagi pemerintah dengan adanya kartu tani adalah membantu proses transparansi dalam pemberian dana subsidi pertanian oleh Kementerian Keuangan. Transparansi ini merupakan kunci yang paling penting agar bantuan dana subsidi dapat diterima kesasaran dengan tepat. Selain itu, juga menghindari adanya penyelewengan dana dari pihak-pihak yang tak bertanggung jawab, sehingga kesejahteraan petani menjadi terganggu.

3. Program Bantuan Pupuk Bersubsidi Tersalurkan dengan Baik

Pupuk merupakan komponen yang paling penting bagi petani untuk meningkatkan produktivitas pertaniannya. Kartu tani bisa digunakan bagi para

petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi di kios-kios yang ditentukan Kementerian Pertanian. Kartu tani yang dimiliki oleh para petani bersisihkan kuota pupuk yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan tersebut tergantung luas lahan yang dimiliki para petani.

1. Memproyeksikan Potensi Panen

Kartu tani juga bisa digunakan oleh pemerintah dalam memproyeksikan potensi panen di wilayah tertentu. Hal ini dikarenakan dalam kartu tani semua data komoditas pertanian dapat dipantau, baik itu berupa nilai jual panen dan sebagainya melalui data yang dimiliki oleh Badan Urusan Logistik (BULOG) sebagai *off taker*. Pemerintah pun bisa menentukan langkah apa saja yang harus dilakukan pada daerah yang berpotensi gagal panen di kemudian hari.

2. Peran Serta *Stakeholder* Lainnya

Peranan para pemerintah daerah sangat menentukan kesuksesan program kartu tani tersebut. Khususnya dinas pertanian yang di kabupaten dan kota. *Stakeholder* lainnya yang memiliki andil besar dalam pelaksanaan program kartu tani adalah Badan Urusan Logistik (BULOG). Disini BULOG bertindak sebagai *off taker* penjualan hasil panen petani secara langsung. Dengan begitu, para petani dapat menikmati keuntungan hasil panen secara menyeluruh (Arfin, 2022).

Menurut Hanifah (2022) ada beberapa manfaat keberadaan kartu tani bagi petani dan pihak ketiga seperti yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Manfaat keberadaan kartu tani bagi petani yaitu:

1. Kepastian ketersediaan saprotan bersubsidi/*non*-subsidi;
2. Kemudahan penjualan hasil panen oleh *off taker* (tanpa melalui perantara);
3. Kemudahan akses pembayaran Kredit Usaha Rakyat (KUR);
4. Menumbuhkan kebiasaan menabung (tidak konsumtif);
5. Biaya simpanan lebih ringan;
6. Mendapatkan Program Prona (BPN);
7. Kemudahan mendapatkan subsidi; dan
8. Memudahkan mendapatkan bansos.

b. Manfaat keberadaan kartu tani bagi pihak ketiga yaitu:

1. Informasi perkiraan jadwal panen (per komoditas dan sebaran wilayah);
2. Penyediaan anggaran serapan hasil panen;

3. Informasi untuk penyediaan gudang dan penanganan pasca panen;
 4. Informasi kebutuhan pupuk beserta sebaran wilayah;
 5. Distribusi pupuk lebih akurat dan sesuai 6 (enam) tepat (tepat jumlah, waktu, tempat, mutu, jenis dan sasaran);
 6. Mempermudah manajemen stok dan perkiraan produksi pupuk; dan
 7. Kemudahan transaksi pembayaran hasil panen kepada petani melalui sistem pembayaran yang terintegrasi.
- c. Tujuan yang ingin dicapai dari program kartu tani bagi masyarakat yaitu penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran dengan berlandaskan pada 6 (enam) asas yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat lokasi, tepat waktu, dan tepat harga. Petani yang menggunakan kartu tani mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan diseluruh agen atau kios yang telah ditentukan, dimana kegiatan pertanian dapat berjalan aman tanpa terganggu oleh tidak tersedianya pupuk bersubsidi. Kartu tani juga berfungsi sebagai tabungan yang dapat digunakan petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Ashari dan Dyah, 2019).
- d. Sasaran dari penerapan kartu tani ini menurut Kementerian Pertanian (2022) tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi tahun anggaran 2022, antara lain:
1. Petani penerima pupuk bersubsidi adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), dan perkebunan (tebu rakyat, kakao, kopi);
 2. Petani harus tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan); dan
 3. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor hortikultura dan sub sektor peternakan dengan luasan maksimal 2 (dua) ha setiap musim tanam.

2.1.5 Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pupuk sangat dibutuhkan untuk meningkatkan hasil produktivitas pertanian. Dalam pendistribusian pupuk seringkali terjadi harga pupuk yang tidak stabil, sehingga pemerintah memberi subsidi berupa pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi sangat diperhatikan dan diawasi oleh pemerintah dalam pendistribusian di setiap daerah (Isabella *dan* Lasmono, 2020). Menurut Kementerian Perdagangan (2023) tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor pertanian, pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian. Selanjutnya, penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari tingkat produsen sampai dengan tingkat petani dan/ atau kelompok tani sebagai konsumen akhir. Penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani melalui pengecer pupuk bersubsidi. Pengecer adalah badan usaha yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada Petani dan/ atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya.

Pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi tahun anggaran 2022. Pupuk bersubsidi adalah pupuk dalam pengadaannya mendapatkan potongan biaya dari pemerintah dengan mekanisme pengawasan tertentu yang ditujukan bagi petani di sektor pertanian. Selanjutnya, pada pasal (2) ayat (2) jenis pupuk bersubsidi terdiri atas Urea, Nitrogen, Phosphat, dan Kalium (NPK).

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mendukung pengkajian ini, ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan
1.	Problematika Impelementasi Program Kartu Tani di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bonang Kabupaten Demak (Prayoga <i>dkk</i> , 2021)	Tujuan penelitian ini untuk memberikan analisis pelaksanaan dan permasalahan dalam implementasi program kartu tani di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bonang Kabupaten Demak	Menggunakan metode kualitatif. Lokasi ditentukan dengan <i>purposive sampling</i> . Penentuan informan menggunakan metode <i>snowball sampling</i> . Analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan	Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pelaksanaan program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sudah sesuai dengan SOP kartu tani yang dibuat oleh pembuat kebijakan, walaupun demikian permasalahan teknis dan non teknis terdapat pada setiap tahapan pelaksanaan program kartu tani. 2)Permasalahan implementasi program kartu tani dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang menjadikan kompleksitas dan kesinambungan dalam permasalahan.
2.	Problematika Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi melalui Kartu Tani di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung (Hanifah, 2022)	Tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui problematika implementasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam problematika implementasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung	Jenis penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder, dalam hal ini teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa problematika implementasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Kranggan telah diimplementasikan dengan baik sesuai dengan Teori Edward III dengan empat variable untuk menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan program pupuk subsidi, empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Meskipun masih terdapat kendala jarak KPL yang jauh dari sasaran masyarakat, dan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM), serta kurang antusias petani.

Lanjutan Tabel 1.

No.	Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan
3.	Problematika Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo (Supianto, 2019)	<p>1. Untuk mengetahui bagaimana Problematika implementasi program beras miskin (RASKIN) di Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo</p> <p>2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam problematika implementasi beras miskin di Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menggambarkan implementasi program beras miskin (Raskin) di Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun permasalahan yang timbul dalam implementasi program beras untuk rakyat miskin (Raskin) di Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut: penetapan daftar nama-nama RTS (Rumah Tangga Sasaran) raskin yang tidak sesuai, kurangnya koordinasi dengan pihak penyelenggara pelaksana distribusi beras raskin, kurangnya pengawas dari pejabat yang berwenang terhadap proses penyaluran Raskin, Seperti 6 T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi). Sebagai patokan keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan kebijakan yaitu pembagian beras tidak tepat waktu dikarenakan stuktur birokrasi yang terlalu panjang, dan rumit serta mutu beras yang rendah akibat kurangnya pengawasan pemerintahan terhadap standar mutu beras yang kemudian didistribusikan kemasyarakat.</p>
4.	Hambatan-Hambatan Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani Di Kabupaten Bojonegoro (Kasiami, 2020)	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kabupaten Bojonegoro.</p>	<p>Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengambilan data observasi, wawancara dan dokumentas. Penentuan informan menggunakan <i>purposive sampling</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan, isi kebijakan masih menjadi hambatan utama. Ketidakberanian pemerintah kabupaten dalam menginisiasi kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.</p>

Lanjutan Tabel 1.

No.	Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan
1.	Implementasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo (Prabawati, 2017)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi program penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Sidoarjo.	Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik namun belum bisa ditebus dengan menggunakan Kartu Tani karena beberapa kendala yang dihadapi seperti beberapa Kartu Tani masih berstatus nonaktif, mesin EDC belum bisa membaca alokasi pupuk bersubsidi, dan sebagian petani merasa mekanisme baru penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani lebih rumit sehingga tujuan dari program penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani ini masih belum tercapai.
6.	Persepsi Petani Dalam Implementasi Program Kartu Tani Untuk Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi (Pasaribu, 2020)	Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi petani terhadap program kartu tani dalam mendukung distribusi pupuk bersubsidi	Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dan analisis menggunakan <i>Weighted Average Index (WAI)</i>	Hasil analisis dengan menggunakan <i>Weighted Average Index (WAI)</i> menunjukkan faktor kuat persepsi petani terhadap kartu tani adalah bahwa program ini tidak tersosialisasi dengan baik dan adanya kesulitan dalam penggunaan kartu ini. Petani juga memberikan persepsi yang kuat terhadap adanya kepastian mendapatkan pupuk bersubsidi, dan kemudahan memperoleh pupuk bersubsidi dengan adanya kartu tani ini. Di sisi lain, petani mempunyai persepsi yang lemah terhadap penggunaan kartu tani ini. Hal ini dikarenakan petani tidak diwajibkan menggunakan kartu tani ini, dan kurangnya promosi dari kios penyalur dalam penggunaan kartu tani.

2.3 Kerangka Pikir

Program kartu tani sebenarnya sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 di Indonesia, namun di Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang baru terealisasi tahun 2022, hanya saja program ini belum berjalan dengan baik dan banyak faktor yang menjadi penyebabnya salah satunya hambatan di lapangan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian khususnya pada sektor pertanian, mengoptimalkan program ini supaya berjalan secara baik dan efektif, dan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani Indonesia khususnya di Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang.

Maka dengan ini untuk mengkaji implementasi program kartu tani menggunakan model implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III (1980) yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan model implementasi menurut Van Metter *dan* Van Horn (1975) yaitu disposisi pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik. Selanjutnya, untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi menurut Rondinelli *dan* Cheema (2015) dalam Aji (2021), yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya, dan karakter institusi implementor.

Dapat dilihat dari permasalahan, upaya untuk mengatasi permasalahan implementasi kebijakan program kartu tani ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dalam sektor pertanian dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan diharapkan program ini berjalan dengan baik dan penyaluran pupuk bersubsidi ini tepat sasaran berlandaskan dengan 6 (enam) tepat yaitu tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat lokasi, dan tepat harga.

Selain itu semoga program kartu tani ini berdampak baik bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani khususnya di Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka digambarkan kerangka pikir dalam pengkajian Problematika Implementasi Program Kartu tani pada Tata Kelola Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

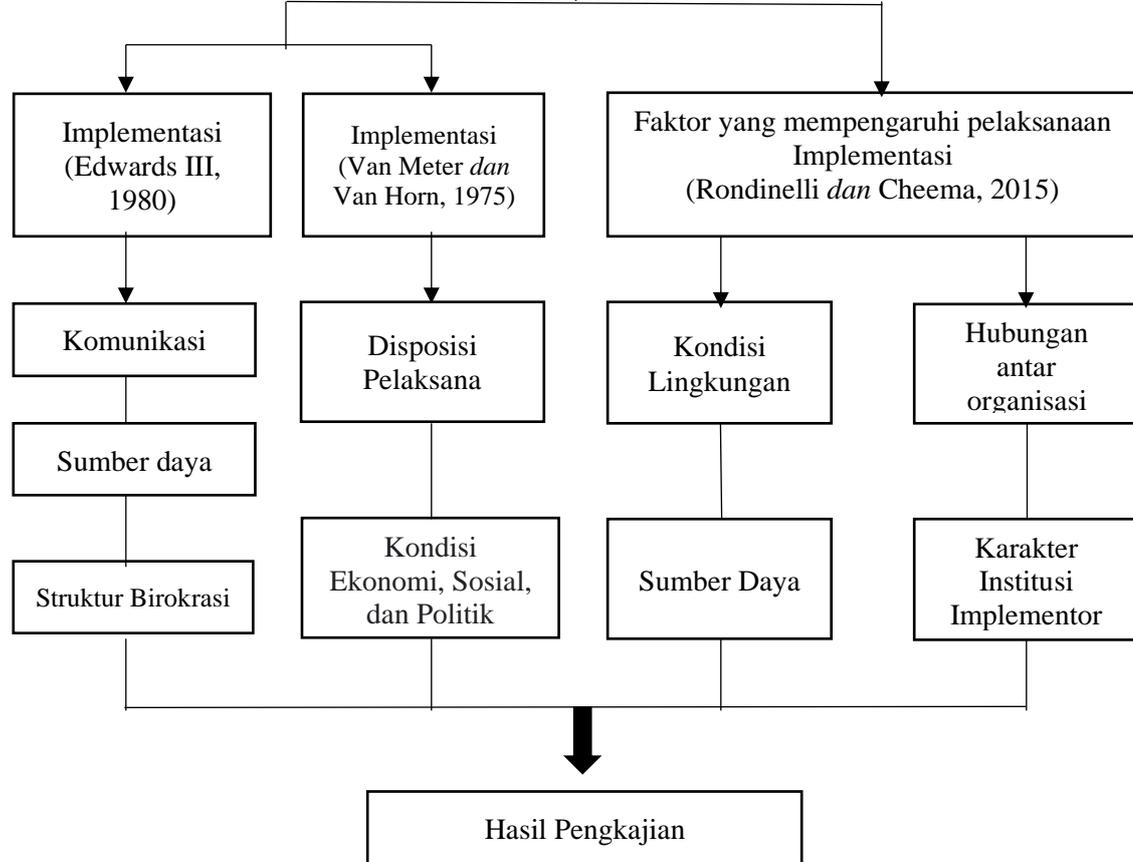
Rumusan Masalah :

1. Bagaimana problematika implementasi program kartu tani pada tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi di daerah penelitian?
2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi program kartu tani pada tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi di daerah penelitian?



Tujuan :

1. Untuk mengkaji problematika implementasi program kartu tani pada tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi di daerah penelitian.
2. Untuk mengkaji faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi program kartu tani pada tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi di daerah penelitian.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Problematika Implementasi Program Kartu Tani

2.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan pengkajian, maka hipotesis dalam pengkajian ini adalah :

Diduga faktor yang menghambat implementasi program kartu tani pada tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, antara lain kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya, dan karakteristik institusi implementor.

